

STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2022



Katalog: 4601001.62
ISSN: 3021-7911



STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2022

Volume 5, 2023

<https://kalteng.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2022

Volume 5, 2023

I S S N : 3021-7911
Nomor Publikasi : 62000.2369
Katalog : 4601001.62
Ukuran Buku : 17,6 x 25 cm
Jumlah Halaman : xii + 60 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah

Gambar Kulit dan Tata Letak:

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah

Sumber Ilustrasi:

Vektor Infografis: *freepik.com*

Diterbitkan Oleh:

© Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah

Dicetak Oleh :

CV. APP Digital Printing

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.

STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2022

Volume 5, 2023

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab Umum:

Eko Marsoro

Penanggung Jawab Teknis:

Ambar Dwi Santoso

Penulis:

Elisamarta Rotua Sibagariang

Editor:

Latif Arafat

Koordinator Gambar Kulit dan Tata Letak:

Anandari

Penyunting:

Fikry Al Katiri

Gambar Kulit:

Elisamarta Rotua Sibagariang

Tata Letak:

Elisamarta Rotua Sibagariang

Infografis:

Elisamarta Rotua Sibagariang

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Kalimantan Tengah 2022 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. Publikasi ini menyajikan informasi mengenai kondisi keamanan di Kalimantan Tengah yang meliputi jumlah dan jenis tindak kriminal, pelaku, korban, dan upaya penanggulangannya. Selain itu, publikasi ini menyajikan informasi mengenai situasi politik Kalimantan Tengah berdasarkan data produk hukum yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan publikasi ini berasal dari data sekunder yang dikumpulkan dari beberapa instansi, antara lain: Kepolisian, Kanwil Hukum dan HAM, Kejaksaan, Kehakiman, dan Sekretariat DPRD di Kalimantan Tengah. Penerbitan publikasi ini merupakan upaya BPS dalam merespon dan memenuhi kebutuhan pengguna data yang semakin kompleks.

BPS Provinsi Kalimantan Tengah mengapresiasi semua pihak yang telah berkontribusi dalam pengumpulan data dan penyusunan publikasi ini. Saran dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan publikasi yang akan datang. Semoga data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini dapat memberikan manfaat bagi para pengguna data sekalian.

Palangka Raya, November 2023

Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Kalimantan Tengah



[Handwritten signature]
Ir. Eko Marsoro, MM.

STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2022

Volume 5, 2023

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	ix
Daftar Tabel	xi
1 Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Maksud dan Tujuan	4
1.3. Ruang Lingkup	4
1.4. Sistematika Penyajian.....	5
2 Metodologi.....	7
2.1. Jenis dan Sumber Data	9
2.2. Konsep dan Definisi.....	9
2.3. Penjelasan Teknis.....	16
3 Gambaran Umum Kriminalitas.....	17
3.1. Sarana dan Prasarana Keamanan Wilayah.....	19
3.2. Perkembangan Tindak Kejahatan di Kalimantan Tengah.....	22
3.3. Jenis-Jenis Tindak Kejahatan di Kalimantan Tengah	25
4 Gambaran Umum Politik.....	27
4.1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	29
4.2. Perkembangan Demokrasi di Provinsi Kalimantan Tengah.....	30
Lampiran	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Rasio Penduduk Per Polisi di Provinsi Kalimantan Tengah, 2022	20
Gambar 3.2	Persentase Penyelesaian Tindak Kejahatan di Provinsi Kalimantan Tengah, 2020-2022	23

<https://kalteng.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Kelompok Kejahatan berdasarkan Jumlah Kejadian yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah, 2022.....	26
Tabel 1	Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan Penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah, 2022.....	37
Tabel 2	Jumlah Kantor Polisi Menurut Kabupaten/Kota dan Wilayah Kerja di Provinsi Kalimantan Tengah, 2022.....	38
Tabel 3	Jumlah Polisi dan Rasio Penduduk per Polisi di Provinsi Kalimantan Tengah, 2022	39
Tabel 4	Jumlah Desa/Kelurahan yang Mempunyai Pos Polisi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, 2021.....	40
Tabel 5	Jumlah Hansip dan Rasio Hansip per Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, 2021.....	41
Tabel 6	Jumlah Tindak Kejahatan yang Dilaporkan (<i>Crime Total</i>) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, 2020-2022 .	42
Tabel 7	Jumlah Tindak Kejahatan yang Diselesaikan (<i>Crime Cleared</i>) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, 2020-2022.....	43
Tabel 8	Persentase Penyelesaian Tindak Kejahatan (<i>Clearance Rate</i>) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, 2020-2022.....	44
Tabel 9	Selang Waktu Terjadinya Tindak Kejahatan (<i>Crime Clock</i>) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, 2020-2022 (Jam:Menit:Detik).....	45
Tabel 10	Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (<i>Crime Rate</i>) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, 2020-2022 .	46

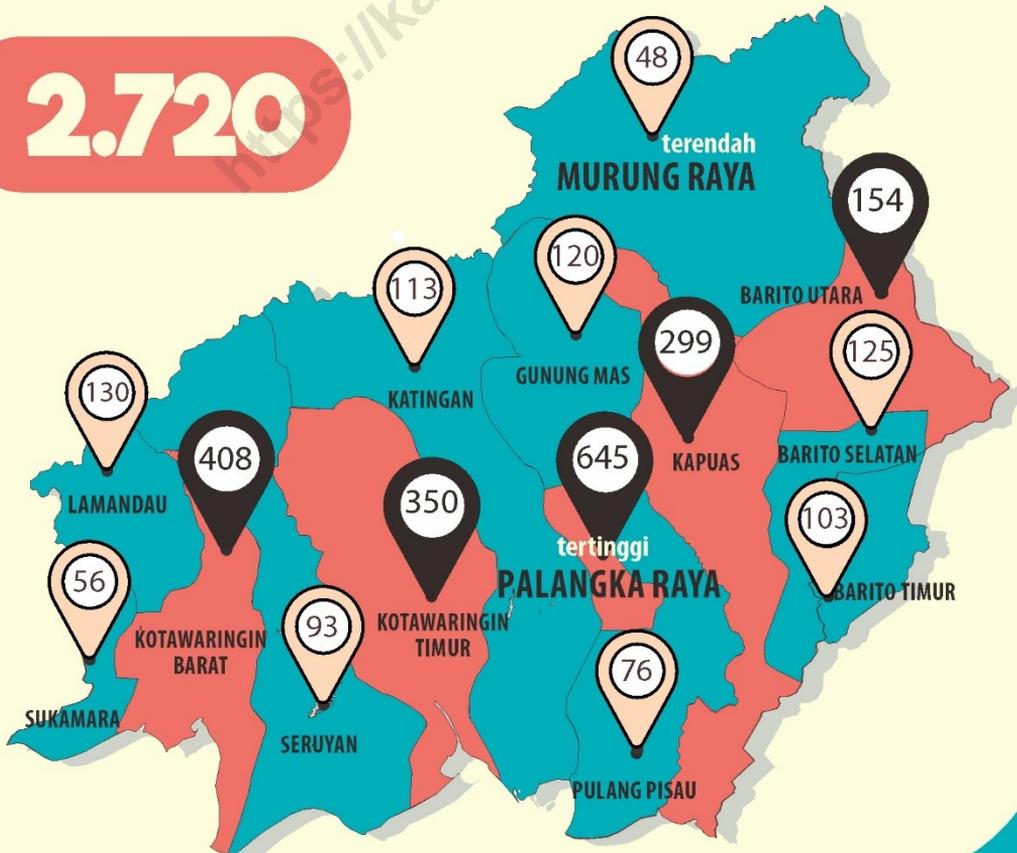
Tabel 11 Jumlah Laporan Tindak Kejahatan Menurut Kelompok Kejahatan di Provinsi Kalimantan Tengah, 2020-2022	47
Tabel 12 Jumlah Laporan Tindak Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan di Provinsi Kalimantan Tengah, 2020-2022	49
Tabel 13 Jumlah Anggota DPRD Provinsi Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Tengah, 2022	50
Tabel 14 Jumlah Peraturan Daerah yang Dihasilkan DPRD Menurut Kabupaten/Kota, 2021-2022.....	51
Tabel 15 Jumlah Peraturan Inisiatif (Prakarsa) DPRD Menurut Kabupaten/Kota, 2021-2022.....	52
Tabel 16 Jumlah Anggota DPRD Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2022.....	53
Tabel 17 Jumlah Organisasi Masyarakat (Ormas)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang Terdaftar di Bakesbangpol Menurut Kabupaten/Kota, 2020-2022.....	54
Tabel 18 [Metode Baru] Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Tengah menurut Aspek, 2022	55
Tabel 19 [Metode Baru] Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Tengah menurut Indikator, 2022	56
Tabel 20 [Metode Baru] Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tingkat Nasional, Pusat, dan Provinsi, 2022	57
Tabel 21 [Metode Baru] Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menurut Provinsi, 2021-2022.....	58
Tabel 22 [Metode Baru] Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menurut Provinsi dan Aspek IDI, 2022	59

01

PENDAHULUAN

Jumlah Laporan Tindak Kejahatan Tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Tengah

2.720



PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keadaan politik merupakan salah satu faktor yang erat kaitannya dengan kondisi keamanan suatu wilayah. Iklim politik yang baik akan menciptakan keadaan keamanan yang kondusif. Lebih lanjut, kondisi politik dan keamanan yang stabil menjadi modal awal bagi pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan pembangunan. Stabilitas politik dan keamanan merupakan salah satu faktor penting dalam menumbuhkan kepercayaan investor untuk berinvestasi dan berusaha secara nyaman dan pasti.

Terciptanya dan terpenuhinya rasa aman pada masyarakat juga akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktifitas, termasuk aktifitas ekonomi. Kondisi ini pada skala makro akan menciptakan stabilitas nasional yang merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Rasa aman yang dirasakan oleh masyarakat tersebut pada dasarnya merupakan variabel kompleks karena mencakup aspek dan dimensi yang sangat luas yaitu politik, sosial, dan ekonomi. Statistik dan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur rasa aman masyarakat menggunakan indikator negatif, misalnya angka kriminalitas (*crime total*). Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang mengindikasikan bahwa masyarakat merasa semakin tidak aman.

Mewujudkan keamanan merupakan tanggung jawab semua lapisan masyarakat yang didukung dengan sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah. Sejalan dengan itu, upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut

memengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Tahun 2019 merupakan tahun politik bagi Indonesia. Secara serentak, rakyat Indonesia telah berpartisipasi baik dengan memilih maupun dipilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden beserta Wakil Presiden dan Legislatif untuk memilih DPR, DPRD, hingga DPD. Beragam kepentingan masyarakat yang ada tidak menutup ruang untuk mengaktualisasikan dirinya melalui berbagai saluran, di antaranya melalui jalur formal lewat pembentukan partai politik. Partai-partai politik baru diijinkan dan diberi kemudahan untuk tumbuh sehingga membuat jumlah partai yang sejak lima periode Pemilu sebelumnya berjumlah tiga, dan bertambah hingga menjadi 48 partai pada Pemilu tahun 1999, kemudian berkurang menjadi 10 partai politik pada Pemilu 2014, dan kembali meningkat menjadi 14 partai politik pada Pemilu 2019.

Dinamika politik tersebut tentunya ikut dirasakan di Kalimantan Tengah. Terlebih lagi, rakyat Kalimantan Tengah juga akan menyelenggarakan pemilihan Gubernur pada tahun 2020 untuk periode 2021-2024. Seiring dengan bergantinya kepemimpinan eksekutif dan legislatif baik pemerintah pusat maupun daerah, berbagai perubahan sistem politik yang terjadi di Kalimantan Tengah menciptakan perbedaan yang signifikan dibandingkan kondisi sebelumnya.

Adanya kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan wilayahnya dan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat memberikan dorongan untuk memprioritaskan kepentingan bersama, sehingga kestabilan keamanan di masyarakat dapat terwujud. Demokratisasi telah membuat politik di Kalimantan Tengah semakin dinamis. Subyek perhatian politik bukan lagi terarah pada pemerintah daerahnya, namun juga wakil rakyat di DPRD, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, bahkan perorangan.

Berbagai hal tersebut menarik untuk dicatat sebagai bagian penting untuk memberikan gambaran tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Selain itu, satu hal penting untuk dicatat adalah kondisi keamanan dan jalannya proses hukum karena keduanya merupakan kunci dari terlaksananya demokrasi yang baik di Indonesia khususnya di Kalimantan Tengah. Melalui publikasi Statistik Politik dan Keamanan 2022 Provinsi Kalimantan Tengah ini, berbagai fenomena politik dan keamanan yang terjadi hingga Tahun 2022 dicatat, didokumentasi dan ditampilkan secara berkala.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan publikasi ini adalah memberikan gambaran mengenai situasi dan kondisi politik serta keamanan di Provinsi Kalimantan Tengah. Tujuan khususnya adalah untuk memperoleh gambaran secara lengkap mengenai karakteristik kejadian tindak kriminalitas, konflik massal, dan peran serta semua elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan dan pembangunan politik di Provinsi Kalimantan Tengah.

1.3. Ruang Lingkup

Publikasi Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 menyajikan gambaran kejadian tindak kejahatan/kriminalitas dan kejadian konflik massal di wilayah Kalimantan Tengah. Publikasi ini juga menyajikan gambaran situasi politik di Kalimantan Tengah. Cakupan penyajian publikasi ini dalam lingkup provinsi. Namun beberapa statistik disajikan hingga level kabupaten/kota secara runtun waktu.

1.4. Sistematika Penyajian

Publikasi ini secara keseluruhan disajikan dalam empat bagian (bab) yang disusun secara sistematis. Bab I menjelaskan latar belakang dan tujuan penyusunan publikasi. Bab II menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penyusunan publikasi ini meliputi jenis dan sumber data, konsep/definisi, dan penjelasan teknis tentang statistik/indikator yang disajikan. Bab III menyajikan gambaran umum kriminalitas di Kalimantan Tengah. Bab IV menyajikan gambaran umum politik di Kalimantan Tengah.

<https://kalteng.bps.go.id>

02

METODOLOGI

Pada tahun 2022,
tindak kejahatan di Kalimantan Tengah terjadi setiap

3 jam **13** menit **14** detik



2.1. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam publikasi ini berasal dari data primer yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan data sekunder dari dinas/instansi terkait di lingkup Provinsi Kalimantan Tengah. Pengumpulan data dengan melakukan kompilasi hasil registrasi/catatan. Data yang bersumber dari BPS antara lain Potensi Desa (Podes) 2018, pengumpulan data pemutakhiran perkembangan desa (Updating Podes) 2021, Survei Statistik Politik dan Keamanan (Statpolkam), dan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Sedangkan data dari dinas/instansi terkait, antara lain berasal dari Kepolisian (Polres/Polresta/Polda), Pengadilan Tinggi, Kementerian Hukum dan HAM, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Sekretariat Dewan, dan DPPKA Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

2.2. Konsep dan Definisi

2.2.1. Peristiwa Kejahatan (Kriminalitas)/ Pelanggaran:

1. Tindak kejahatan/kriminalitas atau pelanggaran merupakan perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan KUHP atau Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.
2. Peristiwa yang dilaporkan ialah setiap peristiwa yang diterima kepolisian dari laporan masyarakat, atau peristiwa di mana pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian.
3. Peristiwa yang diselesaikan oleh kepolisian adalah:

- a. Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa.
- b. Dalam hal delik aduan, pengaduan yang dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang.
- c. Peristiwa yang telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan asas *Plichmatigheid*.
- d. Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi kepolisian.
- e. Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia.
- f. Peristiwa yang telah kadaluwarsa.

2.2.2. Pelaku Kejahatan

Pelaku kejahatan adalah:

- a. Orang yang melakukan kejahatan.
- b. Orang yang turut melakukan kejahatan.
- c. Orang yang menyuruh melakukan kejahatan.
- d. Orang yang membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan.
- e. Orang yang membantu untuk melakukan kejahatan.

2.2.3. Kejahatan Konvensional (*Common Law Crime*)

Kejahatan konvensional (*Common Law Crime*) adalah kejahatan yang dianggap oleh semua orang sebagai kejahatan misalnya pembunuhan, perkosaan, perampokan, dan penyerangan. Pelaku menggunakannya sebagai *Part Time Career* dan seringkali untuk menambah penghasilan dari kejahatan. Perbuatan ini berkaitan dengan tujuan-tujuan sukses ekonomi, akan tetapi dalam hal ini terdapat reaksi dari masyarakat karena nilai pemilikan pribadi telah dilanggar.

2.2.4. Kejahatan Transnasional

Kejahatan Transnasional adalah kejahatan yang tidak hanya bersifat lintas batas negara, tetapi termasuk juga kejahatan yang dilakukan

di suatu negara, tetapi berakibat fatal bagi negara lain. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan apabila terdapat piranti hukum yang dilanggar sehingga bisa saja terjadi suatu perbuatan yang dirumuskan, dirancang, disiapkan, dilaksanakan dalam suatu negara bisa saja bukan merupakan kejahatan namun ketika hasil kejahatan yang diatur, disiapkan melakukan lintas batas negara untuk masuk ke yuridiksi negara yang berbeda.

2.2.5. Jumlah Tindak Kejahatan yang Dilaporkan (*Crime Total*)

Jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan (*Crime Total*) adalah jumlah peristiwa yang dilaporkan, yaitu setiap peristiwa yang diterima kepolisian dari laporan masyarakat, atau peristiwa yang pelakunya tertangkap tangan oleh polisi. Indikator ini memberikan gambaran jumlah tindak pidana yang terjadi pada kurun waktu tertentu dengan tidak menutup kemungkinan masih adanya kasus yang tidak tercatat "*dark number*".

2.2.6. Jumlah Tindak Kejahatan yang Diselesaikan (*Crime Cleared*)

Jumlah tindak kejahatan yang diselesaikan (*Crime Cleared*) merupakan statistik yang menggambarkan jumlah kasus penyelesaian tindak pidana oleh polisi yang terjadi pada kurun waktu tertentu.

2.2.7. Risiko Penduduk Terkena Tindak Kejahatan (*Crime Rate*)

Risiko penduduk terkena tindak kejahatan (*Crime Rate*) adalah angka yang mengindikasikan peluang penduduk berisiko terkena tindak pidana per seratus ribu penduduk. Indikator ini mengindikasikan risiko penduduk terkena tindak pidana pada suatu waktu tertentu. Perbandingan antarwaktu menunjukkan perkembangan tingkat keamanan penduduk.

2.2.8. Pelaku Tindak Kriminalitas

Pelaku tindak kriminalitas adalah orang yang melakukan, turut/menyuruh melakukan, membujuk orang lain, dan membantu melakukan tindak kriminalitas. Klasifikasi pelaku tindak kriminalitas menurut umur (KUHP):

- a. Anak-anak adalah orang yang berumur kurang dari 16 tahun.
- b. Dewasa adalah orang yang berumur 16 tahun dan lebih.
- c. Umum adalah anak-anak dan dewasa.

2.2.9. Tahanan

Tahanan adalah tersangka pelaku tindak kejahatan/pelanggaran yang ditahan oleh pihak kepolisian sebelum diteruskan kepada kejaksaan atau masih dalam proses pengusutan lebih lanjut. Lamanya ditahan tidak melebihi 20 hari.

2.2.10. Kerugian

Kerugian adalah hilang, rusak atau musnahnya harta benda yang ditimbulkan akibat dari suatu peristiwa kejahatan/pelanggaran dan tidak termasuk korban jiwa atau badan.

2.2.11. Korban Kejahatan

Korban kejahatan adalah seseorang atau harta bendanya yang ditimbulkan akibat dari suatu peristiwa kejahatan/pelanggaran dan tidak termasuk korban jiwa atau badan.

2.2.12. Konflik Massal dalam Podes

Konflik massal dalam Podes merujuk pada konflik berupa perkelahian massal yang terjadi dalam satu wilayah desa/kelurahan meliputi;

- a. Perkelahian antar kelompok warga adalah perkelahian antara kelompok warga dengan kelompok warga yang lain dalam satu desa/kelurahan/nagari.
- b. Perkelahian warga antar desa/kelurahan adalah perkelahian antara warga desa/kelurahan/nagari dengan warga desa/kelurahan/nagari lainnya.
- c. Perkelahian warga dengan aparat keamanan adalah perkelahian antara warga desa/kelurahan/nagari dengan aparat keamanan.
- d. Perkelahian warga dengan aparat pemerintah adalah perkelahian antara warga desa/kelurahan/nagari dengan aparat pemerintah.
- e. Perkelahian antar pelajar/mahasiswa adalah perkelahian antar pelajar suatu sekolah dengan pelajar sekolah lain.
- f. Perkelahian antar suku/etnis adalah perkelahian antar suku/etnis yang terjadi di desa/kelurahan/nagari.
- g. Lainnya, antara lain perkelahian antar warga dengan pelajar/mahasiswa, perkelahian antar agama, perkelahian antar aparat keamanan, dan sebagainya.

2.2.13. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga legislatif yang mewakili rakyat di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, memiliki fungsi legislasi (membuat peraturan daerah), penyusunan anggaran, dan pengawasan kerja pemerintah daerah.

2.2.14. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah penyelenggara pemilihan umum di Indonesia yang memiliki struktur berjenjang di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

2.2.15. Partai Politik

Partai Politik adalah organisasi penyalur keterlibatan warganegara dalam memengaruhi kebijakan-kebijakan publik atau perebutan kekuasaan dan jabatan publik.

2.2.16. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No. 8/2012).

2.2.17. Peserta Pemilu Legislatif

Peserta pemilu legislatif adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD (UU No.10/2008).

2.2.18. Jenis Kejahatan yang tercatat pada Survei Statpolkam 2023

Berdasarkan data Survei Statistik Politik dan Keamanan (STATPOLKAM) Tahun 2023 bersumber dari Polda dan Polres di Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat 9 (sembilan) kelompok kejahatan dimana jenis-jenis kejahatan di masing-masing kelompok kejahatan sesuai Survei Statpolkam, yaitu :

- a) Kejahatan terhadap nyawa
 - Pembunuhan
- b) Kejahatan terhadap fisik/badan
 - Penganiayaan ringan
 - Penganiayaan berat
 - Kekerasan dalam rumah tangga

- c) Kejahatan terhadap kesusilaan
 - Perkosaan
 - Pencabulan
- d) Kejahatan terhadap kemerdekaan orang
 - Penculikan
 - Mempekerjakan anak dibawah umur
- e) Kejahatan terhadap hak milik/barang dengan penggunaan kekerasan
 - Pencurian dengan kekerasan
 - Pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api
 - Pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata tajam
- f) Kejahatan terhadap hak milik/barang
 - Pencurian
 - Pencurian dengan Pemberatan
 - Pencurian kendaraan bermotor
 - Pengrusakan/penghacuran barang
 - Pembakaran dengan sengaja
 - Penadahan
- g) Kejahatan terkait narkoba
 - Narkoba dan psikotropika
- h) Kejahatan terkait penipuan, penggelapan, dan korupsi
 - Penipuan/perbuatan curang
 - Penggelapan
 - Korupsi
- i) Kejahatan terkait ketertiban umum
 - Terhadap ketertiban umum

2.3. Penjelasan Teknis

Beberapa indikator keamanan yang ditampilkan dalam publikasi ini adalah:

- a. Angka Indeks Kejahatan (I_t)

$$I_t = \frac{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t}{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t_0} \times 100$$

Dimana : t_0 = tahun dasar

t = tahun t

- b. Angka Kejahatan per 100.000 Penduduk (Crime Rate)

$$\text{Crime Rate} = \frac{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100.000$$

- c. Skala Waktu Kejahatan Tahun t (Crime Clock)

$$\text{Crime Clock} = \frac{365 \times 24 \times 60 \times 60}{\text{Jumlah peristiwa kejahatan tahun } t} \times (\text{detik})$$

- d. Persentase Penyelesaian Peristiwa Kejahatan (Crime Clearance)

$$\text{Crime Clearance} = \frac{\text{Jml peristiwa kejahatan yang diselesaikan}}{\text{Jml peristiwa kejahatan yang dilaporkan}} \times 100 (\%)$$

- e. Indeks Kejahatan (Crime Index)

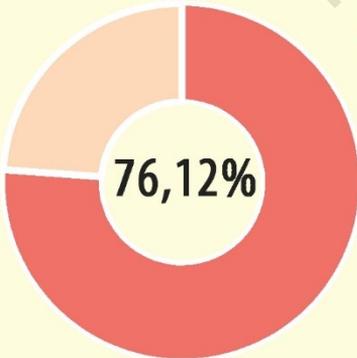
$$\text{Crime Index} = \frac{\text{Jumlah tindak pidana pada tahun } t}{\text{Jumlah tindak pidana pada tahun ke } t_0} \times 100\%$$

03

GAMBARAN UMUM KEAMANAN

Persentase Penyelesaian Tindak Kejahatan
Oleh Pihak Kepolisian di Kalimantan Tengah

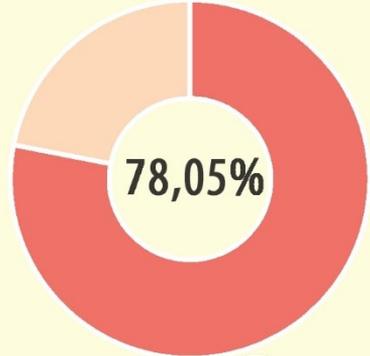
2020



81,32%

2021

2022



GAMBARAN UMUM KRIMINALITAS

3.1. Sarana dan Prasarana Keamanan Wilayah

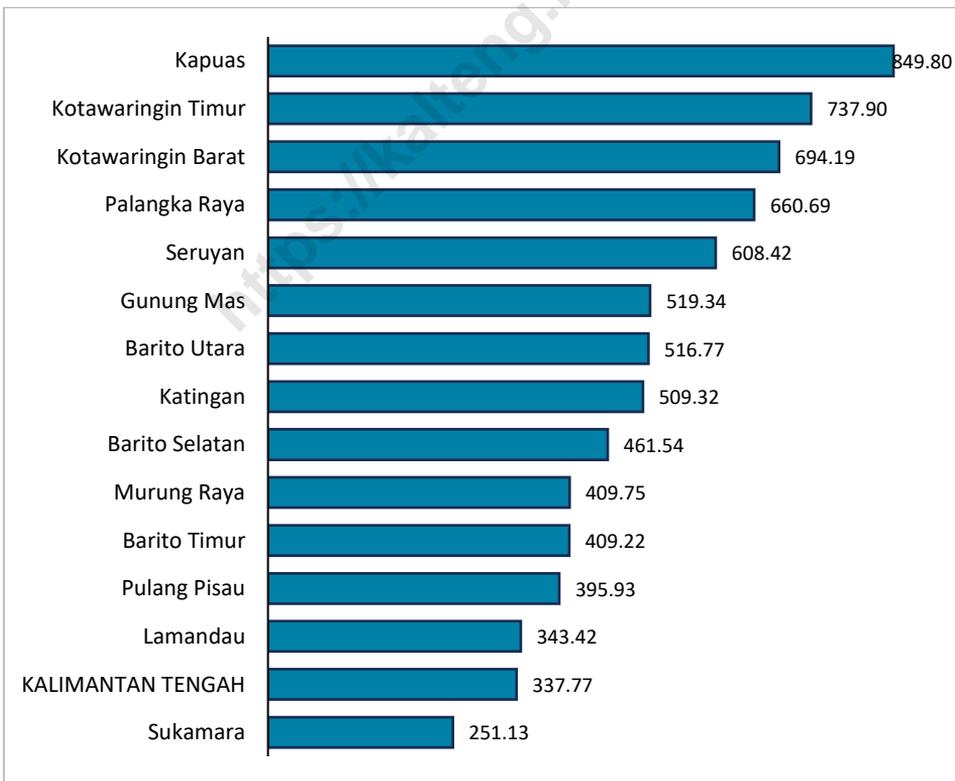
Keamanan suatu wilayah merupakan tanggungjawab bersama baik pemerintah maupun warga negara. Kondisi keamanan wilayah dipengaruhi oleh berbagai hal. Salah satu faktor yang memengaruhi antara lain tercukupinya jumlah personil keamanan. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Selain kepolisian, keberadaan pertahanan sipil (hansip) atau perlindungan masyarakat (linmas) sangat membantu dalam menciptakan keamanan khususnya di tingkat desa. Selain personil keamanan, perlu juga dukungan dari masyarakat serta ketersediaan sarana dan prasarana keamanan yang memadai.

Dalam rangka menjaga stabilitas keamanan wilayah, Provinsi Kalimantan Tengah didukung dengan kelengkapan prasarana keamanan, antara lain satu Kepolisian Daerah (Polda), 14 Kepolisian Resort (Polres/Polresta), 97 Kepolisian Sektor (Polsek/Polsekta) dan 97 pos polisi yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Tengah. Polisi merupakan garda terdepan dalam mencegah kriminalitas dan merupakan satuan organisasi keamanan yang memberikan pelayanan terhadap masyarakat khususnya dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai aparat penegak hukum, jumlah polisi yang bertugas di wilayah Kalimantan Tengah pada tahun 2022 sebanyak 8.115 personil, dimana terdapat 7.518 laki-laki dan 597 perempuan.

Rasio penduduk per polisi merupakan jumlah polisi dibandingkan jumlah penduduk suatu wilayah. Besar kecilnya rasio penduduk per polisi

menentukan efektivitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Semakin kecil rasio penduduk per polisi maka semakin efektif pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Sebaliknya, semakin besar rasio penduduk per polisi memberikan pengaruh pada besarnya pengaduan masyarakat yang tidak tertangani dengan baik, penyidikan berlarut-larut, atau kehadiran polisi di tempat kejadian perkara menjadi tidak tepat waktu.

Peningkatan jumlah personil polisi yang tidak secepat pertambahan jumlah penduduk menjadikan rasio penduduk per polisi cenderung masih tinggi, khususnya untuk beberapa kabupaten/kota di Kalimantan Tengah. Dengan kata lain, rata-rata beban tugas polisi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat masih cukup tinggi.



Sumber: Polda dan Polres Kalimantan Tengah

Gambar 3.1 Rasio Penduduk per Polisi di Provinsi Kalimantan Tengah, 2022

Rasio penduduk per polisi di Kalimantan Tengah pada tahun 2022 sebesar 1:337, artinya setiap personil polisi melayani 337 orang penduduk. Angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 dengan rasio sebesar 1: 220. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata beban tugas polisi dari tahun 2022 dari tahun 2021 meningkat dari 220 menjadi 337 penduduk per polisi. Jika dilihat menurut kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022, rasio penduduk per polisi paling tinggi berada di kabupaten Kapuas yaitu 1:849, diikuti oleh kabupaten Kotawaringin Timur sebesar 1:737. Kabupaten Sukamara menjadi kabupaten dengan rasio penduduk per polisi terendah yaitu 1:251. Ketiga angka ini mengindikasikan bahwa seorang petugas di Kapuas mempunyai beban pelayanan paling besar dibandingkan dengan wilayah kabupaten/kota lainnya, sedangkan beban pelayanan terkecil berada di kabupaten Sukamara. Dengan kata lain rata-rata beban tugas seorang polisi di Kapuas melayani 849 penduduk, sedangkan rata-rata beban tugas seorang polisi di kabupaten Sukamara hanya melayani 251 penduduk. Secara rata-rata beban tugas seorang polisi kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Tengah melayani 337 penduduk.

Keberadaan pos polisi dan pos keamanan lingkungan (kamling) merupakan salah satu prasarana pendukung yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan keamanan masyarakat. Hasil Podes 2021 menunjukkan bahwa di Kalimantan Tengah terdapat 207 (12,13%) desa/kelurahan yang memiliki pos polisi, sedangkan 1.369 desa/kelurahan (86,86%) belum memiliki pos polisi. Jumlah desa/kelurahan dengan keberadaan pos polisi terbanyak berada di Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 28 desa/kelurahan, diikuti dengan Kabupaten Kapuas sebanyak 25 desa/kelurahan. Jumlah desa/kelurahan yang memiliki pos polisi paling sedikit adalah di Kabupaten Palangka Raya yaitu hanya sebanyak 7 desa/kelurahan.

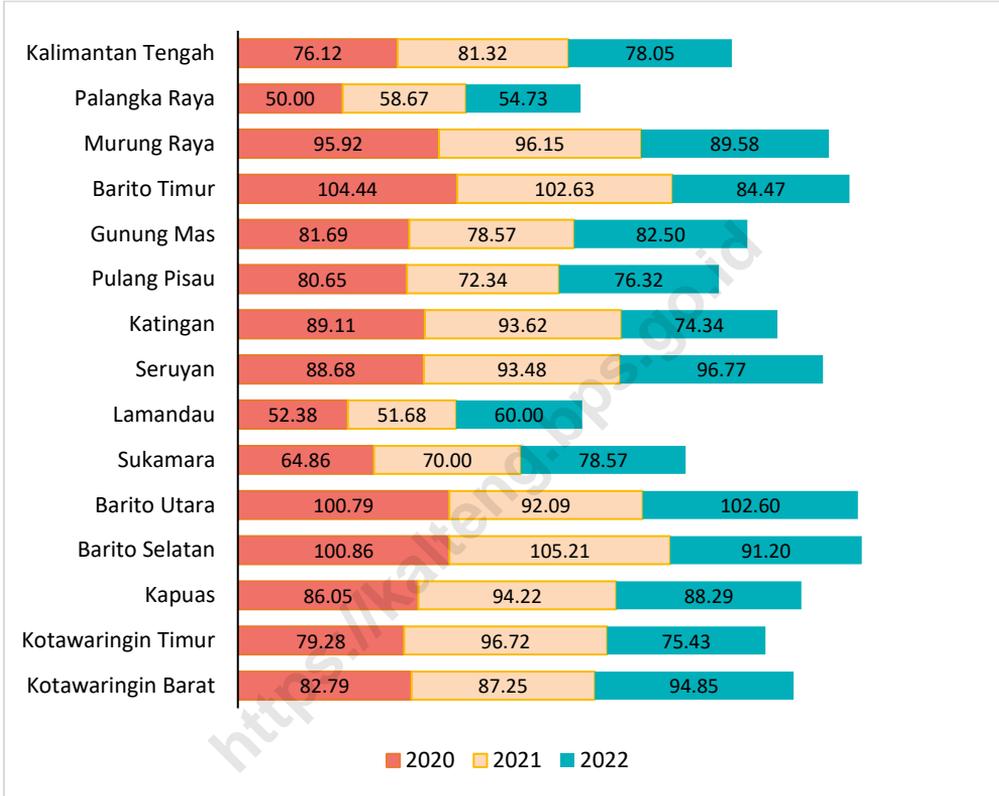
Selain keberadaan sarana pos polisi, banyaknya personil pertahanan sipil di setiap desa/kelurahan akan sangat membantu menjaga stabilitas keamanan. Hansip merupakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana, ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Hasil Podes 2021 (Tabel 5) menunjukkan bahwa jumlah hansip yang ada di Kalimantan Tengah sebanyak 11.000 orang dengan rasio hansip per desa/kelurahan mencapai 1:7, artinya setiap desa/kelurahan dilayani oleh tujuh orang hansip. Apabila dilihat menurut kabupaten/kota, rasio terhadap desa/kelurahan paling kecil berada di Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Murung Raya, yaitu 1:4 atau dengan kata lain rata-rata setiap desa/kelurahan di Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Murung Raya dilayani oleh empat orang hansip. Sedangkan rasio hansip terhadap desa/kelurahan paling besar berada di Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 1:13, artinya rata-rata setiap desa dilayani oleh sekitar 13 orang hansip.

3.2. Perkembangan Tindak Kejahatan di Kalimantan Tengah

Tindak kejahatan atau kriminalitas di suatu wilayah merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang pada masyarakat yang menimbulkan ketegangan individu maupun sosial dan mengancam norma-norma sosial serta berlangsungnya ketertiban sosial.

Tindak kejahatan yang dilaporkan ke pihak kepolisian menunjukkan penurunan di sebagian besar kabupaten/kota di Kalimantan Tengah. Secara umum, jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan di Kalimantan Tengah meningkat sebesar 13,14 persen pada tahun 2022, yaitu dari 2.404 kasus di tahun 2021 menjadi 2.720 kasus di tahun 2022. Dari 14

kabupaten/kota di Kalimantan Tengah, terdapat tiga kabupaten/kota yang mengalami penurunan jumlah kasus yang dilaporkan, yaitu kabupaten Lamandau, kabupaten Pulang Pisau, dan kabupaten Murung Raya.



Sumber: Polda dan Polres Kalimantan Tengah

Gambar 3.2 Persentase Penyelesaian Tindak Kejahatan di Provinsi Kalimantan Tengah, 2020-2022

Selain terjadi peningkatan jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan, juga mengalami penurunan jumlah tindak kejahatan yang diselesaikan di Kalimantan Tengah. Hal ini menjadikan indikator *clearance rate* atau persentase penyelesaian tingkat kejahatan di Kalimantan Tengah menurun dari 81,32 persen pada tahun 2021 menjadi 78,05 persen pada tahun 2022. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja kepolisian dalam penyelesaian tindak kejahatan sangatlah penting untuk menyelesaikan

tindak kejahatan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Menurut wilayah (Gambar 3.2), persentase penyelesaian tindak kejahatan tertinggi tahun 2022 terdapat di kabupaten Barito Utara dan Seruyan. Sedangkan, persentase penyelesaian tindak kejahatan terendah terdapat di kabupaten Palangka Raya yaitu sebesar 54,73 persen.

Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dapat dilihat dari selang waktu kejahatan (*crime clock*). Selang waktu kejahatan adalah selang waktu atau interval waktu antara terjadinya satu tindak kejahatan dengan tindak kejahatan yang lain. Semakin tinggi nilainya menunjukkan bahwa kondisi keamanan dan ketertiban di suatu wilayah semakin membaik. Pada tahun 2022, selang waktu tindak kejahatan (*crime clock*) di Kalimantan Tengah adalah 3 jam 13 menit 14 detik, artinya setiap 3 jam 13 menit 14 detik di Kalimantan Tengah terjadi kasus tindak kejahatan. Selang waktu kejahatan di Kalimantan Tengah pada tahun 2021 lebih baik dibanding tahun 2022, yaitu 3 jam 38 menit 38 detik.

Selang waktu terjadinya tindak kejahatan di kabupaten/kota di Kalimantan Tengah cukup bervariasi (Tabel 9). Selang waktu tindak kejahatan yang paling lama terjadi di wilayah kabupaten Murung Raya yaitu 182 jam 30 menit, diikuti dengan kabupaten Sukamara yaitu 156 jam 25 menit 43 detik. Sementara itu, selang waktu tindak kejahatan yang paling cepat terjadi di kota Palangka Raya yaitu sebesar 13 jam 34 menit 53 detik per setiap satu tindak kejahatan. Dengan melihat nilai selang waktu tindak kejahatan dapat dikatakan bahwa kota Palangka Raya merupakan kota paling rawan terjadinya tindak kejahatan dibanding kabupaten/kota di Kalimantan Tengah. Hal ini tentunya sangat wajar mengingat Kota Palangka Raya merupakan ibukota provinsi yang menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, pendidikan dan sosial budaya.

Setiap penduduk memiliki risiko terkena tindak kejahatan. Semakin besar risiko yang dimiliki penduduk menggambarkan bahwa semakin tidak amannya suatu wilayah. Pada tahun 2022, risiko penduduk terkena tindak pidana di Kalimantan Tengah sebanyak 99 per 100.000 penduduk. Artinya, setiap 100.000 penduduk di Kalimantan Tengah ada sebanyak 99 penduduk yang berisiko terkena tindak kejahatan. Angka tersebut meningkat dibanding tahun 2021 sebesar 89 per 100.000 penduduk. Tabel 10 menunjukkan risiko penduduk terkena tindak kejahatan di Kalimantan Tengah selama tahun 2020-2022 menurut kabupaten/kota. Selama tahun 2019-2021, Kota Palangka Raya yang merupakan pusat perekonomian wilayah menjadi paling berisiko terkena tindak kejahatan setiap tahun.

3.3. Jenis-jenis Tindak Kejahatan di Kalimantan Tengah

Berdasarkan data Survei Statistik Politik dan Keamanan (STATPOLKAM) Tahun 2023 jenis kejahatan tertinggi yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah adalah kejahatan narkoba dan psicotropika sebesar 1.232 kejadian, kejahatan pencurian dengan pemberatan sebesar 722 kejadian, dan kejahatan penggelapan sebesar 458 kejadian. Sedangkan jenis kejahatan terendah adalah penculikan, kejahatan mempekerjakan anak dibawah umur, kejahatan terhadap ketertiban umum, dan pencurian sebesar 1 kejadian (Tabel 12). Oleh karena itu, diperlukan kewaspadaan yang lebih besar dari aparat kepolisian untuk mencegah kasus penyalahgunaan/peredaran narkoba. Tindakan proaktif terhadap generasi muda melalui sosialisasi bahaya narkoba juga penting dilakukan karena karena sebagian besar penduduk Kalimantan Tengah merupakan penduduk usia produktif. Selain itu, pemerintah perlu menyediakan fasilitas rehabilitasi bagi penduduk yang sudah terlanjur terpapar oleh

penyalahgunaan narkoba agar dapat kembali berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

Tabel 3.1. Kelompok Kejahatan berdasarkan Jumlah Kejadian yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah, 2022

No.	Kelompok Kejahatan	Jumlah Kejadian
(1)	(2)	(3)
1.	Kejahatan terhadap Nyawa	26
2.	Kejahatan terhadap Fisik/Badan	392
3.	Kejahatan terhadap Kesusilaan	162
4.	Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang	1
5.	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan	72
6.	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang	1.439
7.	Kejahatan Terkait Narkotika	1.232
8.	Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi	663
9.	Kejahatan terkait Ketertiban Umum	1

Sumber: Polda dan Polres Kalimantan Tengah

Berdasarkan laporan dari Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa ada 3 kelompok kejahatan yang paling banyak terjadi di tahun 2022 adalah kejahatan terhadap Hak Milik/Barang tanpa/dengan penggunaan kekerasan sebanyak 1.439 kasus; kejahatan terkait Narkotika sebanyak 1.232 kasus; dan kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi sebanyak 663 kasus. Dalam rentang waktu yang sama, terdapat 1 (satu) kejadian kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang dan kejahatan terkait Ketertiban Umum di Kalimantan Tengah.

04

GAMBARAN UMUM POLITIK

INDEKS DEMOKRASI KALIMANTAN TENGAH 2022

IDI METODE BARU

79,30

Kategori
"SEDANG"



3 ASPEK IDI METODE BARU

INDIKATOR IDI METODE BARU

01

Aspek Kebebasan
82,05%

02

Aspek Kesetaraan
77,61%

03

Aspek Kapasitas
Lembaga Demokrasi
78,62%

Terdapat 22 indikator
IDI metode baru

TERTINGGI



100

TERENDAH



35

Kinerja lembaga legislatif

- (1) Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara
- (2) Kesetaraan Gender
- (3) Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan
- (4) Pendidikan politik pada kader partai politik

GAMBARAN UMUM POLITIK

4.1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

DPRD merupakan lembaga yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Tabel 13 menyajikan data tentang jumlah anggota DPRD menurut partai politik di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022. Jumlah anggota DPRD provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2022 sebanyak 45 orang yang berasal dari 11 partai politik. Anggota DPRD provinsi paling banyak berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebanyak 12 orang, diikuti dengan Partai Golkar sebanyak 7 orang, sementara itu Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menjadi partai dengan perolehan kursi paling sedikit yaitu masing-masing 1 orang. Mayoritas anggota DPRD provinsi Kalimantan Tengah adalah berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 30 orang (66,67%). Sementara itu keterlibatan perempuan sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebanyak 15 orang (33,33%).

Salah satu peran yang dimiliki DPRD adalah fungsi legislasi yang tercermin dari jumlah produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD. Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan DPRD pada tahun 2022 sebanyak 118 perda, dimana 16 perda inisiatif (Prakarsa) DPRD. Jumlah perda yang dihasilkan tahun 2022 lebih banyak daripada tahun 2021, yaitu sebesar 103 perda.

4.2. Perkembangan Demokrasi di Provinsi Kalimantan Tengah

Sesuai dengan konsepnya, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, artinya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka yang mewakili rakyat yang dipilih di bawah sistem pemerintahan. Demokrasi merupakan sistem politik yang memberikan keadilan dan persamaan bagi semua warga negara. Namun secara praktik di lapangan, demokrasi diterapkan secara berbeda-beda. Penerapan demokrasi beragam, sering kali diterapkan secara sepihak oleh penguasa. Oleh karena itu untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan demokrasi di suatu wilayah dan terdapat keterbandingan antar wilayah diperlukan instrumen yang universal.

Freedom House melakukan pengukuran demokrasi pada tahun 1972 menggunakan klasifikasi *free countries*, *partly free countries*, dan *non free countries*. Sejak tahun 2008, Negara Indonesia termasuk dalam *free countries*, sementara sebelumnya digolongkan dalam negara *partly free countries*. Untuk mengukur pembangunan demokrasi sampai level provinsi, sejak tahun 2007, Indonesia telah mengembangkan pengukuran demokrasi yang berbasis provinsi yang disebut Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Di samping level nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia.

IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu adalah Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*).

Pengumpulan data IDI dilakukan dengan mengkombinasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai tahapan yang saling melengkapi. Pada tahap pertama data kuantitatif dikumpulkan dari coding

(reviu) surat kabar dan dokumen tertulis seperti Peraturan Daerah (Perda) atau peraturan dan surat keputusan kepala daerah, yang sesuai dengan indikator-indikator IDI. Temuan-temuan tersebut kemudian diverifikasi dan dielaborasi melalui *Focus Group Discussion* (FGD) sebagai tahap pengumpulan data kedua, sekaligus menggali kasus-kasus yang tidak tertangkap di koding surat kabar/dokumen. Pada tahap ketiga data-data yang telah terkumpul tersebut diverifikasi melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang kompeten memberikan informasi tentang indikator IDI. Semua tahapan pengumpulan data dilakukan oleh BPS Provinsi, diolah di BPS RI, dan diverifikasi oleh Dewan Ahli beserta mitra kerja lain pada semua tahapannya.

Penghitungan IDI melalui tiga tahapan proses yakni pertama, menghitung skor akhir untuk setiap indikator; kedua, menghitung indeks provinsi; dan ketiga, menghitung indeks keseluruhan atau IDI Nasional. Ketiga tahapan ini secara hierarki terkait satu dengan yang lain. Skor masing-masing indikator IDI (28 indikator) di setiap provinsi memberikan kontribusi dalam penghitungan indeks 11 variabel IDI, selanjutnya indeks dari 11 variabel memberikan kontribusi terhadap penghitungan indeks tiga aspek IDI. Komposit indeks ketiga aspek IDI inilah yang merefleksikan indeks demokrasi di masing-masing provinsi. Dan pada akhirnya komposit indeks provinsi menentukan IDI Nasional. Metode pengumpulan data IDI sesuai prosedur menggunakan beberapa tahap antara lain koding koran, koding dokumen, FGD dan wawancara mendalam.

Penghitungan IDI Tahun 2021 merupakan yang pertama dihitung dengan metode baru, sehingga angkanya tidak dapat dibandingkan dengan metode sebelumnya (2009-2020). Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Nasional merupakan agregasi dari nilai Provinsi dan Pusat. Ada 3 (tiga) aspek IDI metode baru, yaitu aspek kebebasan, aspek kesetaraan, dan

aspek kapasitas lembaga demokrasi. IDI metode baru terdiri dari 22 indikator, yaitu:

1. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara
2. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat
3. Terjaminnya kebebasan berkeyakinan
4. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan
5. Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu
6. Pemenuhan hak-hak pekerja
7. Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya
8. Kesetaraan gender
9. Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan
10. Anti monopoli sumber daya ekonomi
11. Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial
12. Kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah
13. Akses masyarakat terhadap informasi public
14. Kesetaraan dalam pelayanan dasar
15. Kinerja lembaga legislative
16. Kinerja lembaga yudikatif
17. Netralitas penyelenggara pemilu
18. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah
19. Jaminan pemerintah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat

20. Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah

21. Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik

22. Pendidikan politik pada kader partai politik

Untuk menggambarkan capaian tingkat demokrasi dalam IDI digunakan skala 0-100, dimana semakin tinggi nilai indeks menunjukkan kualitas demokrasi suatu wilayah yang semakin baik. Sebaliknya, semakin rendah angka indeks, menunjukkan kualitas demokrasi suatu wilayah yang semakin buruk. Skala ini merupakan skala normatif di mana 0 adalah tingkat terendah dan 100 adalah tingkat tertinggi. Tingkat terendah (nilai indeks = 0) secara teoretik dapat terjadi bila semua indikator mendapatkan skor yang paling rendah (skor 0). Sebaliknya, tingkat tertinggi (nilai indeks = 100) secara teoritik dimungkinkan apabila seluruh indikator memperoleh skor tertinggi. Selanjutnya, untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks yang dihasilkan, skala 0-100 tersebut dibagi ke dalam tiga kategori tingkat demokrasi, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60-80), dan “buruk” (indeks < 60).

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022 metode baru sebesar 79,30 dalam skala indeks 0 sampai 100 termasuk dalam kategori “sedang”. IDI merupakan indeks komposit yang disusun dari 3 aspek dan 22 indikator. Capaian IDI Kalimantan Tengah tahun 2022 metode baru menurut nilai indeks dari aspek Kebebasan sebesar 82,05, aspek Kesetaraan sebesar 77,61 dan aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi sebesar 78,62. Apabila dimaknai menurut kategori “baik”, “sedang”, dan “buruk”, pada 2022 semua aspek menunjukkan performa yang “sedang”.

LAMPIRAN



Tabel 1. Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan Penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah, 2022

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk (ribu)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Kotawaringin Barat	9 480,3	6	94	274,9
02 Kotawaringin Timur	15 543,8	17	185	436,1
03 Kapuas	17 033,6	17	233	423,2
04 Barito Selatan	6 267,1	6	93	132,0
05 Barito Utara	9 984,8	9	103	160,2
06 Sukamara	3 311,2	5	32	66,8
07 Lamandau	7 632,4	8	90	104,4
08 Seruyan	15 215,2	10	100	166,1
09 Katingan	20 382,3	13	161	164,0
10 Pulang Pisau	9 650,9	8	99	136,2
11 Gunung Mas	9 305,8	12	128	142,3
12 Barito Timur	3 212,5	10	103	115,4
13 Murung Raya	23 575,3	10	125	113,5
71 Palangka Raya	2 848,7	5	30	305,9
62 Kalimantan Tengah	153 443,9	136	1 576	2 741,0

Sumber: BPS, Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2023

Tabel 2. Jumlah Kantor Polisi Menurut Kabupaten/Kota dan Wilayah Kerja di Provinsi Kalimantan Tengah, 2022

Kabupaten/Kota	Polda	Polres/ Polresta	Polsek/ Polsekta	Pos Polisi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Kotawaringin Barat	-	1	6	1
02 Kotawaringin Timur	-	1	13	5
03 Kapuas	-	1	12	4
04 Barito Selatan	-	1	6	3
05 Barito Utara	-	1	7	0
06 Sukamara	-	1	5	0
07 Lamandau	-	1	4	3
08 Seruyan	-	1	5	7
09 Katingan	-	1	9	0
10 Pulang Pisau	-	1	8	2
11 Gunung Mas	-	1	6	0
12 Barito Timur	-	1	6	0
13 Murung Raya	-	1	6	5
71 Palangka Raya	-	1	4	14
Kalimantan Tengah	1	14	97	97

Sumber: Polda dan Polres Kalimantan Tengah

Tabel 3. Jumlah Polisi dan Rasio Penduduk per Polisi di Provinsi Kalimantan Tengah, 2022

No.	Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Penduduk per Polisi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kotawaringin Barat	366	30	396	694,19
2	Kotawaringin Timur	548	43	591	737,90
3	Kapuas	464	34	498	849,80
4	Barito Selatan	271	15	286	461,54
5	Barito Utara	299	11	310	516,77
6	Sukamara	259	7	266	251,13
7	Lamandau	291	13	304	343,42
8	Seruyan	266	7	273	608,42
9	Katingan	309	13	322	509,32
10	Pulang Pisau	330	14	344	395,93
11	Gunung Mas	261	13	274	519,34
12	Barito Timur	270	12	282	409,22
13	Murung Raya	266	11	277	409,75
14	Palangka Raya	423	40	463	660,69
15	Polda Kalteng	2 895	334	3 229	-
Kalimantan Tengah		7 518	597	8 115	337,77

Sumber: Polda dan Polres Kalimantan Tengah

Tabel 4. Jumlah Desa/Kelurahan yang Mempunyai Pos Polisi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, 2021

Kabupaten/Kota	Pos Polisi
(1)	(2)
01 Kotawaringin Barat	15
02 Kotawaringin Timur	28
03 Kapuas	25
04 Barito Selatan	11
05 Barito Utara	10
06 Sukamara	9
07 Lamandau	14
08 Seruyan	18
09 Katingan	17
10 Pulang Pisau	14
11 Gunung Mas	10
12 Barito Timur	13
13 Murung Raya	16
71 Palangka Raya	7
62 Kalimantan Tengah	207

Sumber: BPS, Podes 2021

Tabel 5. Jumlah Hansip dan Rasio Hansip per Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, 2021

Kabupaten/Kota	Jumlah Hansip	Rasio Hansip
(1)	(2)	(3)
01 Kotawaringin Barat	1 180	13
02 Kotawaringin Timur	1 249	7
03 Kapuas	1 749	8
04 Barito Selatan	875	9
05 Barito Utara	776	8
06 Sukamara	336	11
07 Lamandau	604	7
08 Seruyan	646	6
09 Katingan	774	5
10 Pulang Pisau	991	10
11 Gunung Mas	464	4
12 Barito Timur	755	7
13 Murung Raya	445	4
71 Palangka Raya	156	5
62 Kalimantan Tengah	11 000	7

Sumber: BPS, Podes 2021

Tabel 6. Jumlah Tindak Kejahatan yang Dilaporkan (*Crime Total*) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, 2020-2022

Kabupaten/Kota		2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)
01	Kotawaringin Barat	308	345	408
02	Kotawaringin Timur	333	305	350
03	Kapuas	294	277	299
04	Barito Selatan	116	96	125
05	Barito Utara	127	139	154
06	Sukamara	37	30	56
07	Lamandau	105	149	130
08	Seruyan	106	92	93
09	Katingan	101	94	113
10	Pulang Pisau	124	94	76
11	Gunung Mas	71	84	120
12	Barito Timur	90	76	103
13	Murung Raya	49	52	48
71	Palangka Raya	622	571	645
62	Kalimantan Tengah	2 483	2 404	2 720

Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2023

Tabel 7. Jumlah Tindak Kejahatan yang Diselesaikan (*Crime Cleared*) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, 2020-2022

Kabupaten/Kota		2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)
01	Kotawaringin Barat	255	301	387
02	Kotawaringin Timur	264	295	264
03	Kapuas	253	261	264
04	Barito Selatan	117	101	114
05	Barito Utara	128	128	158
06	Sukamara	24	21	44
07	Lamandau	55	77	78
08	Seruyan	94	86	90
09	Katingan	90	88	84
10	Pulang Pisau	100	68	58
11	Gunung Mas	58	66	99
12	Barito Timur	94	78	87
13	Murung Raya	47	50	43
71	Palangka Raya	311	335	353
62	Kalimantan Tengah	1 890	1 955	2 123

Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2023

Tabel 8. Persentase Penyelesaian Tindak Kejahatan (*Clearance Rate*) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, 2020-2022

Kabupaten/Kota		2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)
01	Kotawaringin Barat	82,79	87,25	94,85
02	Kotawaringin Timur	79,28	96,72	75,43
03	Kapuas	86,05	94,22	88,29
04	Barito Selatan	100,86	105,21	91,20
05	Barito Utara	100,79	92,09	102,60
06	Sukamara	64,86	70,00	78,57
07	Lamandau	52,38	51,68	60,00
08	Seruyan	88,68	93,48	96,77
09	Katingan	89,11	93,62	74,34
10	Pulang Pisau	80,65	72,34	76,32
11	Gunung Mas	81,69	78,57	82,50
12	Barito Timur	104,44	102,63	84,47
13	Murung Raya	95,92	96,15	89,58
71	Palangka Raya	50,00	58,67	54,73
62	Kalimantan Tengah	76,12	81,32	78,05

Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2023

Tabel 9. Selang Waktu Terjadinya Tindak Kejahatan (*Crime Clock*) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, 2020-2022 (Jam:Menit:Detik)

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
01 Kotawaringin Barat	28:26:30	25:23:29	21:28:14
02 Kotawaringin Timur	26:18:23	28:43:17	25:01:43
03 Kapuas	29:47:45	31:37:28	29:17:52
04 Barito Selatan	75:31:02	91:15:00	70:04:48
05 Barito Utara	68:58:35	63:01:18	56:52:59
06 Sukamara	236:45:24	292:00:00	156:25:43
07 Lamandau	83:25:43	58:47:31	67:23:05
08 Seruyan	82:38:29	95:13:03	94:11:37
09 Katingan	86:43:58	93:11:29	77:31:20
10 Pulang Pisau	70:38:43	93:11:29	115:15:47
11 Gunung Mas	123:22:49	104:17:09	73:00:00
12 Barito Timur	97:20:00	115:15:47	85:02:55
13 Murung Raya	178:46:32	168:27:42	182:30:00
71 Palangka Raya	14:05:01	15:20:29	13:34:53
Kalimantan Tengah	3:31:41	3:38:38	3:13:14

Sumber: Polda dan Polres Kalimantan Tengah

Tabel 10. Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (*Crime Rate*) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, 2020-2022

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
01 Kotawaringin Barat	114	127	148
02 Kotawaringin Timur	78	70	80
03 Kapuas	72	66	71
04 Barito Selatan	88	73	95
05 Barito Utara	82	88	96
06 Sukamara	58	46	84
07 Lamandau	108	148	124
08 Seruyan	65	56	56
09 Katingan	62	58	69
10 Pulang Pisau	92	69	56
11 Gunung Mas	52	61	84
12 Barito Timur	79	66	89
13 Murung Raya	44	46	42
71 Palangka Raya	212	191	211
Kalimantan Tengah	93	89	99

Sumber: Polda dan Polres Kalimantan Tengah

Tabel 11. Jumlah Laporan Tindak Kejahatan Menurut Kelompok Kejahatan di Provinsi Kalimantan Tengah, 2022

Kabupaten/Kota	Kejahatan terhadap Nyawa	Kejahatan terhadap Fisik/Badan	Kejahatan terhadap Kesusilaan	Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang tanpa/dengan Penggunaan Kekerasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01 Kotawaringin Barat	0	31	5	1	4
02 Kotawaringin Timur	3	37	10	0	2
03 Kapuas	6	18	21	0	4
04 Barito Selatan	1	9	7	0	1
05 Barito Utara	1	13	13	0	1
06 Sukamara	1	10	5	0	0
07 Lamandau	0	0	0	0	2
08 Seruyan	0	6	12	0	0
09 Katingan	1	16	2	0	0
10 Pulang Pisau	0	6	10	0	2
11 Gunung Mas	2	18	1	0	1
12 Barito Timur	1	13	2	0	1
13 Murung Raya	2	5	1	0	0
71 Palangka Raya	0	70	18	0	5
71 Polda Kalteng	8	140	55	0	49
Kalimantan Tengah	26	392	162	1	72

Sumber: Polda dan Polres Kalimantan Tengah

Tabel 11. Jumlah Laporan Tindak Kejahatan Menurut Kelompok Kejahatan di Provinsi Kalimantan Tengah, 2022 (lanjutan)

Kabupaten/Kota	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang	Kejahatan Terkait Narkotika	Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi	Kejahatan terkait Ketertiban Umum
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)
01 Kotawaringin Barat	0	31	5	1
02 Kotawaringin Timur	3	37	10	0
03 Kapuas	6	18	21	0
04 Barito Selatan	1	9	7	0
05 Barito Utara	1	13	13	0
06 Sukamara	1	10	5	0
07 Lamandau	0	0	0	0
08 Seruyan	0	6	12	0
09 Katingan	1	16	2	0
10 Pulang Pisau	0	6	10	0
11 Gunung Mas	2	18	1	0
12 Barito Timur	1	13	2	0
13 Murung Raya	2	5	1	0
71 Palangka Raya	0	70	18	0
71 Polda Kalteng	8	140	55	0
Kalimantan Tengah	1 439	1 232	663	1

Sumber: Polda dan Polres Kalimantan Tengah

Tabel 12. Jumlah Laporan Tindak Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan di Provinsi Kalimantan Tengah, 2022

Kelompok Kejahatan	2022
(1)	(2)
Kejahatan terhadap Nyawa	
1 Pembunuhan	8
Kejahatan terhadap Fisik/Badan	
2 Penganiayaan Ringan	40
3 Penganiayaan Berat	25
4 Kekerasan Dalam Rumah Tangga	75
Kejahatan terhadap Kesusilaan	
5 Perkosaan	3
6 Pencabulan	52
Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang	
7 Penculikan	0
8 Mempekerjakan Anak Dibawah Umur	0
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan	
9 Pencurian dengan Kekerasan	20
10 Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api (Senpi)	6
11 Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam (Sajam)	23
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang	
12 Pencurian	0
13 Pencurian dengan Pemberatan	351
14 Pencurian Kendaraan Bermotor	161
15 Pengrusakan/Penghancuran Barang	18
16 Pembakaran dengan Sengaja	4
17 Penadahan	20
Kejahatan Terkait Narkotika	
18 Narkotika dan Psikotropika	691
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi	
19 Penipuan/Perbuatan Curang	92
20 Penggelapan	222
21 Korupsi	7
Kejahatan terhadap Ketertiban Umum	
22 Terhadap Ketertiban Umum	0
Jumlah	1 818

Sumber: Polda Kalimantan Tengah

Tabel 13. Jumlah Anggota DPRD Provinsi Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Tengah, 2022

	Partai Politik	Laki-laki	Perempuan	Total
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	8	4	12
2	Partai Golongan Karya (Golkar)	4	3	7
3	Partai Demokrat	5	1	6
4	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	4	1	5
5	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	3	2	5
6	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	2	2	4
7	Partai Amanat Nasional (PAN)	1	1	2
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1	0	1
9	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1	0	1
10	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	1	0	1
11	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	0	1	1
	Jumlah	30	15	45

Sumber: Sekwan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah

Tabel 14. Jumlah Peraturan Daerah yang Dihasilkan DPRD Menurut Kabupaten/Kota, 2021-2022

Wilayah		2021	2022
(1)		(2)	(3)
01	Kotawaringin Barat	13	15
02	Kotawaringin Timur	4	9
03	Kapuas	6	5
04	Barito Selatan	2	7
05	Barito Utara	8	8
06	Sukamara	7	15
07	Lamandau	1	0
08	Seruyan	13	2
09	Katingan	6	8
10	Pulang Pisau	4	6
11	Gunung Mas	14	10
12	Barito Timur	2	7
13	Murung Raya	6	11
71	Palangka Raya	10	10
62	Kalimantan Tengah	7	5
Jumlah		103	118

Sumber: Sekwan DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi Kalimantan Tengah

Tabel 15. Jumlah Peraturan Inisiatif (Prakarsa) DPRD Menurut Kabupaten/Kota, 2021-2022

Wilayah	2021	2022
(1)	(2)	(3)
01 Kotawaringin Barat	2	2
02 Kotawaringin Timur	1	2
03 Kapuas	0	0
04 Barito Selatan	0	0
05 Barito Utara	0	1
06 Sukamara	0	0
07 Lamandau	1	0
08 Seruyan	2	0
09 Katingan	0	0
10 Pulang Pisau	1	1
11 Gunung Mas	0	2
12 Barito Timur	1	4
13 Murung Raya	0	0
71 Palangka Raya	3	3
62 Kalimantan Tengah	0	1
Jumlah	13	16

Sumber: Sekwan DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi Kalimantan Tengah

Tabel 16. Jumlah Anggota DPRD Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2022

Kabupaten/Kota	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01 Kotawaringin Barat	25	83,33	5	16,67	30	100
02 Kotawaringin Timur	31	77,50	9	22,50	40	100
03 Kapuas	29	72,50	11	27,50	40	100
04 Barito Selatan	15	60,00	10	40,00	25	100
05 Barito Utara	16	64,00	9	36,00	25	100
06 Sukamara	15	75,00	5	25,00	20	100
07 Lamandau	16	80,00	4	20,00	20	100
08 Seruyan	22	88,00	3	12,00	25	100
09 Katingan	21	84,00	4	16,00	25	100
10 Pulang Pisau	18	72,00	7	28,00	25	100
11 Gunung Mas	13	52,00	12	48,00	25	100
12 Barito Timur	18	72,00	7	28,00	25	100
13 Murung Raya	21	84,00	4	16,00	25	100
71 Palangka Raya	20	66,67	10	33,33	30	100
62 Provinsi Kalimantan Tengah	30	66,67	15	33,33	45	100
Kalimantan Tengah	310	72,94	115	27,06	425	100

Sumber: DPRD Kabupaten/Kota/Provinsi Kalimantan Tengah

Tabel 17. Jumlah Organisasi Masyarakat (Ormas)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang Terdaftar di Bakesbangpol Menurut Kabupaten/Kota, 2022

Kabupaten/Kota	Mendaftar Tahun Ini	Total Terdaftar
(1)	(2)	(3)
01 Kotawaringin Barat	2	35
02 Kotawaringin Timur	20	78
03 Kapuas	8	160
04 Barito Selatan	14	45
05 Barito Utara	43	225
06 Sukamara	0	61
07 Lamandau	15	94
08 Seruyan	15	100
09 Katingan	9	66
10 Pulang Pisau	24	92
11 Gunung Mas	0	30
12 Barito Timur	2	36
13 Murung Raya	0	131
71 Palangka Raya	12	33
62 Provinsi Kalimantan Tengah	0	203
Kalimantan Tengah	164	1 389

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota/Provinsi Kalimantan Tengah

Tabel 18. [Metode Baru] Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Tengah menurut Aspek, 2022

Aspek IDI	IDI Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Aspek
	2022
(1)	(2)
I. Aspek Kebebasan	82,05
II. Aspek Kesenjangan	77,61
III. Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	78,62
IDI Kalimantan Tengah	79,30
IDI Indonesia	80,41

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, IDI 2022

Catatan: Penghitungan nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menggunakan metode baru untuk tahun 2021.

*Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Nasional merupakan agregasi dari nilai Provinsi dan Pusat.

Tabel 19. [Metode Baru] Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menurut Indikator, 2022

No.	Indikator	2022
(1)	(2)	(3)
1	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara	89,81
2	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat	74,52
3	Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	83,01
4	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	100,00
5	Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu	48,67
6	Pemenuhan hak-hak pekerja	88,80
7	Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	83,23
8	Kesetaraan gender	100,00
9	Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	100,00
10	Anti monopoli sumber daya ekonomi	55,67
11	Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial	61,87
12	Kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah	95,74
13	Akses masyarakat terhadap informasi publik	80,38
14	Kesetaraan dalam pelayanan dasar	69,45
15	Kinerja lembaga legislatif	35,00
16	Kinerja lembaga yudikatif	86,97
17	Netralitas penyelenggara pemilu	93,33
18	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	96,67
19	Jaminan pemerintah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	76,62
20	Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah	71,43
21	Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik	69,80
22	Pendidikan politik pada kader partai politik	100,00
IDI Provinsi Kalimantan Tengah		79,30

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, IDI 2022

Catatan: Penghitungan nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menggunakan metode baru untuk tahun 2021.

*Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Nasional merupakan agregasi dari nilai Provinsi dan Pusat.

Tabel 20. [Metode Baru] Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tingkat Nasional, Pusat, dan Provinsi, 2022

Aspek IDI	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
	2022
(1)	(2)
Nasional*	80,41
Pusat	84,29
Provinsi**	77,95
IDI Kalimantan Tengah	79,30

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, IDI 2022

*Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Nasional merupakan agregasi dari nilai Provinsi dan Pusat.

**Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi merupakan agregasi dari nilai 34 provinsi.

Tabel 21. [Metode Baru] Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menurut Provinsi, 2021-2022

No.	Provinsi	IDI 2021	IDI 2022
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Aceh	80,92	80,82
2	Sumatera Utara	77,60	79,53
3	Sumatera Barat	78,51	77,35
4	Riau	75,66	73,64
5	Jambi	72,91	77,19
6	Sumatera Selatan	78,63	80,59
7	Bengkulu	72,73	73,23
8	Lampung	80,18	78,32
9	Kep. Bangka Belitung	74,11	76,65
10	Kep. Riau	79,53	78,77
11	DKI Jakarta	82,08	82,13
12	Jawa Barat	79,72	83,34
13	Jawa Tengah	81,15	84,79
14	DI Yogyakarta	81,21	85,62
15	Jawa Timur	81,31	84,92
16	Banten	75,93	78,75
17	Bali	75,35	83,21
18	Nusa Tenggara Barat	72,69	73,38
19	Nusa Tenggara Timur	73,42	77,83
20	Kalimantan Barat	74,03	81,48
21	Kalimantan Tengah	73,17	79,30
22	Kalimantan Selatan	75,41	80,86
23	Kalimantan Timur	81,02	83,58
24	Kalimantan Utara	79,38	78,79
25	Sulawesi Utara	80,41	78,22
26	Sulawesi Tengah	77,95	80,92
27	Sulawesi Selatan	74,85	80,09
28	Sulawesi Tenggara	77,96	80,35
29	Gorontalo	77,01	73,74
30	Sulawesi Barat	71,30	74,03
31	Maluku	66,76	75,26
32	Maluku Utara	68,82	62,93
33	Papua Barat	68,68	64,02
34	Papua	66,39	66,65

Sumber: Diolah dari data Survei Demokrasi Indonesia 2021 dan 2022

Tabel 22. [Metode Baru] Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menurut Provinsi dan Aspek IDI, 2022

No.	Provinsi	Aspek Kebebasan	Aspek Kesetaraan	Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	84,66	80,10	77,90
2	Sumatera Utara	87,66	77,71	73,71
3	Sumatera Barat	78,01	79,85	73,69
4	Riau	84,46	70,53	66,69
5	Jambi	77,13	74,04	81,01
6	Sumatera Selatan	86,78	80,86	74,15
7	Bengkulu	68,95	81,29	67,81
8	Lampung	79,90	79,37	75,52
9	Kep. Bangka Belitung	66,36	78,11	85,05
10	Kep. Riau	88,34	76,05	72,60
11	DKI Jakarta	87,39	85,34	73,12
12	Jawa Barat	90,61	82,61	77,05
13	Jawa Tengah	88,83	82,73	83,25
14	DI Yogyakarta	87,35	88,76	80,17
15	Jawa Timur	88,48	82,12	84,77
16	Banten	83,80	80,84	71,27
17	Bali	85,78	83,90	79,83
18	Nusa Tenggara Barat	76,75	77,24	65,44
19	Nusa Tenggara Timur	89,06	74,43	70,83
20	Kalimantan Barat	91,35	78,58	75,23
21	Kalimantan Tengah	82,05	77,61	78,62
22	Kalimantan Selatan	80,70	80,86	81,01
23	Kalimantan Timur	91,40	79,25	81,06
24	Kalimantan Utara	77,93	80,88	77,13
25	Sulawesi Utara	77,76	82,80	73,20
26	Sulawesi Tengah	81,69	81,51	79,46
27	Sulawesi Selatan	83,39	86,09	69,66
28	Sulawesi Tenggara	87,49	85,83	66,74
29	Gorontalo	65,31	82,21	71,92
30	Sulawesi Barat	67,78	83,46	68,90
31	Maluku	74,49	79,72	70,69
32	Maluku Utara	70,84	66,83	50,47
33	Papua Barat	53,64	74,47	61,77
34	Papua	67,23	67,85	64,63

Sumber: Diolah dari data Survei Demokrasi Indonesia 2021 dan 2022

ST 2023
SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Jl. Kapten Piere Tendean No.06, Palangka Raya, 73112

Telp: (0536) 3228105, Fax: (0536) 3221380

Homepage: <http://kalteng.bps.go.id>, Email: bps6200@bps.go.id

ISSN 3021-7911

